

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KECAMATAN BENAI

**IKA ELPASRA
&
ZAILI RUSLI**

Program Study Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km,12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. 28293 Telp/Fax (0761) 63277
Jalan Cengkeh No 13 Email Ika_pasra@yahoo.com
Telp (081378005401)

ABSTRACT

People's Market Management in Benai. One area of strategic execution by the Head is the field of market management, hygiene and landscaping, because in terms of the span of control and management of the service will be more effectively and efficiently implemented by the district. Related to this Kuantan Singingi Regent has issued Decree No. 312 of 2008 on the submission guidelines partial authority market management, cleanliness and landscaping.

Based on the analysis of the above data it can be concluded that in part the delegation of authority to the Head Benai district does not meet hygiene field as it should. Limiting factors can be caused by several things, both internally and externally. Caused internally by the agency itself in the form of lack of district performance in making devolution regent in the field of hygiene. In extern can be caused by outside agencies such as the environment that have not been aware of the cleanliness thereby inhibiting itself.

Keywords : Strategy, Management, Market

Kebijakan Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan.

Pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah,

Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Salah satu bidang kewenangan yang sangat strategis pelaksanaannya oleh Camat adalah bidang pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan, karena dari segi rentang kendali pelayanan dan pengurusan akan sangat lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh camat. Terkait hal ini Bupati Kuantan Singingi telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 312 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan.

Untuk menindak lanjuti keputusan Bupati ini Dinas PKP Kuantan Singingi telah melaksanakan kajian dan evaluasi menyeluruh serta langkah-langkah persiapan menyeluruh dalam rangka penyerahan kewenangan ini kepada camat se kabupaten Kuantan Singingi. Penyerahan kewenangan pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.

Terdapat beberapa fenomena yang tampak yakni pada penataan pedagang pasar, masih banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang disediakan, bahkan terdapat beberapa pedagang yang berjualan ditepi jalan yang tentunya mengganggu pengguna jalan. Selain itu pengelolaan retribusi, masih terdapat beberapa penyelewengan uang retribusi, hal ini diketahui dari jumlah retribusi yang diterima semakin menurun, padahal pengguna jasa semakin meningkat. Dalam hal rekomendasi pemberian kios juga belum maksimal, hal ini dapat dirasakan masyarakat masih sulit memperoleh izin mendirikan kios, disamping harganya mahal juga administrasi yang terkesan berbelit-belit.

Dalam hal pengelolaan persampahan, pada pasar Benai masih terlihat banyak sampah berserakan setelah pasar usai, tidak adanya pembuangan sementara membuat pedagang membiarkan sampahnya didepan kios masing-masing dan menunggu dibawa oleh petugas sampah yang terkadang datang sangat lama sehingga meninggalkan bau yang tidak sedap disekitar pasar.

Dalam hal penataan ruang terbuka hijau terus dimaksimalkan, ini dapat dilihat dengan adanya beberapa pembangunan taman-taman kecil yang ditanami banyak pohon rindang dan juga beberapa titik daerah yang ditanami tumbuhan rindang. Begitu juga penerangan yang dilakukan dinas kebersihan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, walaupun masih saja terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki penerangan.

Untuk monitoring, pengawasan dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada kecamatan tetap berada kewenangannya pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan yang diserahkan kepada camat diiringi dengan penyerahan pembiayaan yang menyangkut dengan kegiatan dimaksud, yang sebelumnya telah dianggarkan melalui Dinas PKP Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu masing-masing Kecamatan diminta mengusulkan anggaran terkait pelimpahan kewenangan ini sehingga mulai Januari 2010 segala hal yang terkait dengan pembiayaan dan penyelenggaraan sudah langsung berada di bawah kewenangan camat sebagai pelaksana pelimpahan kewenangan ini.

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan berkomitmen penuh untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kuantan Singingi ini demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi, dan kerjasama semua pihak khususnya Pemda dalam hal ini Dinas PKP dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sangat diharapkan demi suksesnya proses pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi telah menyelesaikan agenda kerja dan rencana kerja yang menjadi prioritas pelaksanaan pada tahun ini. Berdasarkan Laporan Realisasi fisik dan keuangan Dinas PKP tahun 2011 seluruh kegiatan telah terealisasi 100 persen, begitu pula dengan realisasi keuangannya. Disamping itu Dinas PKP adalah satu dari beberapa dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi pelaksanaannya mencapai 109,33 Persen. ini merupakan keberhasilan dan kerja keras seluruh aparatur Dinas PKP dalam mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Terdapat beberapa fenomena yang tampak yakni pada penataan pedagang pasar, masih banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang disediakan, bahkan terdapat beberapa pedagang yang berjualan ditepi jalan yang tentunya mengganggu pengguna jalan. Selain itu pengelolaan retribusi, masih terdapat beberapa penyelewengan uang retribusi, hal ini diketahui dari jumlah retribusi yang diterima semakin menurun, padahal pengguna jasa semakin meningkat. Dalam hal rekomendasi pemberian kios juga belum maksimal, hal ini dapat dirasakan masyarakat masih sulit memperoleh izin mendirikan kios, disamping harganya mahal juga administrasi yang terkesan berbelit-belit.

Dalam hal pengelolaan persampahan, pada pasar Benai masih terlihat banyak sampah berserakan setelah pasar usai, tidak adanya pembuangan sementara membuat pedagang membiarkan sampahnya didepan kios masing-masing dan menunggu dibawa oleh petugas sampah yang terkadang datang sangat lama sehingga meninggalkan bau yang tidak sedap disekitar pasar.

Dalam hal penataan ruang terbuka hijau terus dimaksimalkan, ini dapat dilihat dengan adanya beberapa pembangunan taman-taman kecil yang ditumbuhi banyak pohon rindang dan juga beberapa titik daerah yang ditanami tumbuhan rindang. Begitu juga penerangan yang dilakukan dinas kebersihan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, walaupun masih saja terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki penerangan.

Untuk monitoring, pengawasan dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada kecamatan tetap berada kewenangannya pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan yang diserahkan kepada camat diiringi dengan penyerahan pembiayaan yang menyangkut dengan kegiatan dimaksud, yang sebelumnya telah dianggarkan melalui Dinas PKP Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu masing-masing Kecamatan diminta mengusulkan anggaran terkait pelimpahan kewenangan ini sehingga mulai Januari 2010 segala hal yang terkait dengan pembiayaan dan penyelenggaraan sudah langsung berada di bawah kewenangan camat sebagai pelaksana pelimpahan kewenangan ini.

METODE

Bentuk penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan analisa kualitatif . Oleh karena itu penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode deskriptif yang berusaha memahami masalah ber- dasarkan fakta tentang pernyataan yang berada dilokasi penelitian. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

HASIL

Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Benai

Sebagai ujung tombak pelayanan berhadapan langsung dengan masyarakat, perangkat daerah di wilayah harus memiliki jiwa pamong. Dengan sifat mengayomi, mau serta mampu mendengar dan merasakan kebutuhan maupun aspirasi masyarakat di wilayah. Sekaligus memberikan fasilitas serta solusi sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.. Sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah, diharapkan perangkat di kecamatan hendaknya tetap menjalin hubungan baik, koordinasi serta kerjasama konstruktif. Baik dengan unsur Muspika maupun seluruh stakeholders di kecamatan.

Salah satu kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat yakni keputusan bupati Kuantan Singing Nomor 312 tahun 2008 yang berisi penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan pasar, kebersihan dan pertamanan kepada camat se kabupaten Kuantan Singingi.

Wewenang yang akan diserahkan kepada Kecamatan (Camat) adalah sebagai berikut;

1. Pengelolaan Kebersihan
2. Penataan Pedagang pasar
3. Pengelolaan Retribusi
4. Pemberian Rekomendasi Penempatan Kios
5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan
6. Pemeliharaan lampu jalan dan taman

Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah daerah akan mampu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Masyarakat akan percaya kepada pemerintahnya dan dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah akan semakin besar. Masyarakat menginginkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat semakin luas. Pemahaman kebutuhan masyarakat dan permasalahan publik bukan hanya monopoli pemerintah daerah tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan pemerintah daerah.

Kebersihan merupakan salah satu aspek pelayanan dari daerah yang layak dinikmati oleh masyarakat Benai. Namun dalam proses tersebut masih saja terdapat berbagai ketidakmaksimalan kinerja camat dalam melaksanakan sebagian wewenang yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan beberapa sumber media menyatakan bahwa surat penyerahan sebagian wewenang yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi kepada camat Benai belumlah terealisasi secara maksimal, hal ini terbukti bahwa masih banyaknya kekurangan tempat pembuangan sampah di beberapa titik penting daerah Kecamatan Benai, kurangnya tenaga kebersihan dan belum maksimalnya kinerja camat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan Kecamatan Benai .

Oleh sebab itu evaluasi tentulah diperlukan, untuk melihat sejauh mana wewenang dari Bupati yang telah dilaksanakan oleh camat dan kekurangan serta kelebihan apa saja yang perlu diperbaiki dalam masa sekarang dan kedepannya nanti.

Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain (Surato.2002:15)

Dengan mempelajari sejarah pemerintahan, akan dapat dipahami perkembangan perubahan filosofi dan paradigma yang mendasari setiap peraturan perUUan mengenai pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah No 72 dan 73 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan serta Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, ditegaskan, selain melaksanakan tugas-tugas bersifat atribut, yakni berkenaan tugas umum pemerintahan, camat juga melaksanakan tugas-tugas bersifat delegatif. Itu merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati.

Salah satu prasyarat yang perlu dipersiapkan daerah dalam menyambut terbitnya ketentuan penyerahan urusan meupun pelimpahan kewenangan dalam penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas aparatur di tingkat wilayah. Sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada camat benar-benar efektif dilaksanakan dan dapat membantu tugas-tugas bupati dalam kerangka efesensi dan pembinaan kewilayahan. Dalam rangka menggali partisipasi serta

keterlibatan masyarakat, maka dituntut peran lebih optimal dari aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut peran aparat kecamatan harus dapat memberikan pengayoman, pelayanan prima serta fasilitas kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

Adapun yang menjadi tolak ukur evaluasi pada kewenangan bupati kepada camat mengenai kebersihan adalah:

A. Pelimpahan kewenangan Bupati Kuantan Singingi kepada Kecamatan Benai secara umum

1. Pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada camat
2. Kinerja camat dalam melaksanakan kewenangan
3. Peran camat dalam melaksanakan kewenangan
4. Tindakan camat dalam melaksanakan kewenangan

B. Peranan pelimpahan kewenangan Bupati Kuantan Singingi kepada Kecamatan Benai

1. Tingkat kebersihan secara umum
2. Peranan tenaga kebersihan
3. Peranan penampungan sampah
4. Peranan Fasilitas kebersihan dalam menjaga kebersihan

C. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati Kuantan Singingi kepada Kecamatan Benai

1. Kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan sebagaimana mestinya
2. Tenaga kebersihan telah sesuai dengan kebutuhan
3. Fasilitas kebersihan sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan
4. Tempat pembuangan sampah telah tersedia sesuai kebutuhan

D. Hasil pelimpahan kewenangan Bupati Kuantan Singingi kepada Kecamatan Benai

1. Tingkat kebersihan telah sesuai dengan yang diharapkan
2. Tindakan camat dalam hal kebersihan telah sesuai sebagaimana mestinya
3. Procedure pelaksanaan kewenangan telah sesuai
4. Seluruh aparat yang berwenang dalam Kebersihan telah melaksanakan tugasnya
5. Seluruh kewenangan yang dilimpahkan telah terealisasi dengan sebagaimana mestinya
6. Hambatan dalam melaksanakan kewenangan telah diatasi
7. Solusi yang diberikan camat dalam masalah kebersihan sesuai dengan kewenangan yang diberikan

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan mengalami suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu suatu pekerjaan. Ini tentunya tidak akan terlepas dari berbagai faktor baik intern maupun ekstern. Berikut ini ada beberapa hambatan yang terjadi pada pelimpahan wewenang dalam hal kebersihan;

1. Tingkat pendidikan yang dimiliki anggota responden hanya 10 orang dari 28 orang yang memiliki gelar sarjana, sehingga banyak diantara mereka yang kurang memahami akan pelimpahan wewenang tersebut sebagaimana mestinya.
2. Kecamatan sering mengalami permasalahan dalam menyampaikan program kebersihan kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan itu sendiri.
3. Masih kurangnya pengarahan dari kecamatan terhadap anggota dan perangkat lainnya dalam menjalankan wewenang yang ada.

Hambatan diatas dapat disebabkan oleh beberapa hal baik secara intern maupun ekstern. Secara intern disebabkan oleh instansi kecamatan itu sendiri berupa kurangnya kinerja dalam

melakukan pelimpahan wewenang bupati dalam bidang kebersihan. Secara ekstrem dapat disebabkan oleh lingkungan luar instansi seperti masyarakat yang belum sadar benar akan kebersihan sehingga menghambat pelimpahan itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin : *Ad* = intensif dan *ministrare* = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli 2005:20) administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Siagian (2006:2) administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Zulkifli (2005:16-17) bahwa konsep administrasi diidentikkan dengan Berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (*korespondensi*) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Dwight waldo (dalam teori dan konsep administrasi 2011 : 11) administarsi adalah sebagai suatu kerja sama manusia yang didasarkan pada pembagian kerja secara rasional dalam mencapai tujuan bersama, Rumusan, atau defenisi ini memperlihatkan kerja sama manusia sebagai objek dari lokus atau pendekatan pembagian kerja yang rasional yang berdasarkan pemikiran filasaft rasionalisme.

2. Konsep Organisasi

Zulkifli (2005: 73) yang mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukkan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi. selanjutnya Menurut Darwis, dkk (2009:11) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2006: 25) mengatakan bahwa organisasi adalah “Setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antars seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan”.

Menurut oliver sheldon (dalam dasar-dasar organisasi 2002:24) “Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.”

3. Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry (Dalam Manajemen dasar dan pengertian masalah 2006:2) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut Hasibuan (2006:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Konsep Efisiensi

Perkembangan dunia yang semakin kompleks, menciptakan kondisi lingkungan yang menuntut perubahan kearah kemajuan pada organisasi. Tidak jauh dari hal itu organisasi sebagai suatu sistem tidak bisa mengalami perubahan akibat interaksi antar organisasi dengan lingkungan. Perubahan ini sangat diharapkan menimbulkan dampak yang positif bagi kemajuan organisasi guna pencapaian tujuan yang efektif dan efisien yang akan dicapai organisasi agar perubahan yang terjadi dapat terencana dan mengena kesatu arah perkembangan dan pembangunan.

Individu dianggap menggabungkan diri dalam organisasi dengan maksud mencapai tujuan pribadi mereka (seperti penghasilan, status, pekerjaan yang berarti) secara lebih baik. Demikian pula, organisasi dipandang sebagai kesatuan pengejar tujuan yang berusaha menggabungkan usaha bersama para anggotanya untuk mengejar sasaran khusus keseluruhan organisasi (misalnya, laba, pertumbuhan, produktifitas).

Efektifitas dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana organisasi berhasil mendapat dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan tujuan operasionalnya (Steers, 1980:91).

5. Pengelolaan Pasar

a. Sejarah pasar dan perkembangan pasar

Sudah sejak zaman dahulu kota tidak akan pernah terlepas dari pusat kegiatan komersil yang disebut dengan pasar. Sejarah pasar diawali pada zaman pra sejarah, dimana didalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan sistem barter yaitu suatu sistem yang diterapkan antara dua individu dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yanglainnya dan akhirnya sistem barter ini berkembang secara luas. Proses penukaran barang tersebut menimbulkan masalah akan tempat di mana tempat sendiri berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh.

Pasar tradisional adalah tempat berjualan yang tradisional (turun temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang – barang yang diperjual belikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yangdisepakati melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit diatas harga standart. Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan – bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas – batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal – bangsal, loods – loods, gudang, toko – toko, stand – stand/kios – kios, toilet umum pada sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai – nilai kekeluargaan yang tinggi.

c. Bentuk dan pola pasar

1. Pola pasar yang homogen(Homogeneous preferences)

Menunjukkan suatu pasar dimana semua konsumen yang dapat dikatakan mempunyai pola yang sama (baik mengenai harga maupun kualitasnya). Para konsumen mempunyai kesukaan yang sama terhadap merk yang ada.

2. Pola pasar yang menyebar (Diffused Preferences)

Menunjukkan konsumen yang mempunyai sudut pandang yang berbeda – beda tentang apa yang mereka inginkan.

3. Pola pasar yang menyebar secara terkoordinir (Berkelompok)

Menunjukkan kemungkinan yang lain, yaitu polayang mengelompok didalam suatu product space atau disebut juga dengan pasar tradisional.

d. Pengertian pasar menurut Image masyarakat.

Pengertian pasar menurut image masyarakat pada umumnya adalah :

1. Pada dasarnya pasar adalah suatu tempat dimana masyarakat dapat memperoleh/memenuhi kebutuhan (dalam hal ini disebut dengan konsumen adalah petani).
2. Barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari.
3. Barang yang diperdagangkan adalah bahan makanan (hasil Pertanian) dan hasil industri kerajinan rakyat.
4. Struktur bangunan yang dipergunakan didominasi oleh lods-lods terbuka di atassuatu pelataran yang jelas dapat dibedakan dari kelompok pertokoan yang terdiri dari bangunan-bangunan rumah perseorangan (sering digunakan sebagai tempat tinggal. (sumber: LPEM – FEUI, Laporan Survey Pasar DKI Jakarta,1976 hal.54. dalam Josua Moreno Sinaga, 2009)

e. Penggolongan jenis pasar

Pasar dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal. Antara lain :

a.Pasar menurut kegiatannya yang dapat digolongkan dalam :

1. Pasar eceran yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang atau pemberian jasa secara eceran atau retail.
2. Pasar grosir, dimana terdapat permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar

Pasar induk, pasar yang merupakan pusat pengumpulan, pelelangan, penyimpanan bahan – bahan pangan untuk disalurkan kepada grosir dan pusat pembelian.

b.Pasar menurut lokasi dan kemampuan pelayanan

1. Pasar lingkungan
2. Pasar wilayah
3. Pasar kota

c.Pasar menurut waktu kegiatan digolongkan kedalam :

1. Pasar siang hari
2. Pasar malam hari
3. Pasar siang malam.Pasar menurut jenis barang dagangan digolongkan atas

- Pasar umum, mencakup berbagai jenis barang dagangan.
- Pasar khusus, mencakup satu jenis barang dagangan tertentu. (Sumber : Wijaya Rosli, 1999,

f. Unsur – Unsur Penunjang Pasar

Unsur – unsur penunjang pasar yaitu pihak – pihak yang berwenang dan berperandalam berjalannya aktifitas dan kegiatan perdagangan pada suatu pasar. Unsur – unsur pasar ini meliputi :

1. Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah wajib menjaga dan mengatur kestabilan perekonomian sertakelanjutan ekonomi pembangunan, salah satunya adalah dengan menguasai sektor perpasaran dengan mengelola, menentukan klasifikasi pasar, membuat pajak pasar pada

lingkup wilayah pengawasannya. Pembangunan bentuk fisik pasar biasanya dilakukan dengan menggunakan Anggaran Daerah atau Inpres.

2. Bank

Dalam hal ini bank berperan untuk membantu dalam pembiayaan bangunan dan memberikan modal untuk para pedagang, contohnya pelaksanaan pembangunan pasar inpres, yang dibiayai melalui bank pemerintah, memberikan pinjaman kredit bagi para pedagang kecil yang disalurkan melalui bank pemerintah seperti BNI, BRI dan lain – lain.

3. Swasta

Dalam hal ini swasta adalah merupakan para pedagang itu sendiri atau pelaksana (kontraktor) yang membiayai pembangunan pasar, dengan prinsip pembangunan fasilitas pasar dibiayai oleh dana dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat kedalam bentuk lain.

g. Syarat – Syarat Pasar Tradisional

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007, tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional

- a. Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, Dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau Pengaturan Lalulintas.
- b. Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadilingkungannya.
- c. Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana. d. Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya

h. Uraian Jenis dan Fungsi Ruang dalam Pasar Tradisional

Ruang – ruang yang dibutuhkan untuk melakukan atau melangsungkan kegiatan pada perencanaan pasar rakyat Benai, antara lain : 1. Kios dan Lods : Untuk melakukan kegiatan perdagangan, antara lain memerlukan kios, lods. Kios dan lods dibagi menjadi tiga bagian yaitu : untuk perbelanjaan basah, semi basah dan perbelanjaan kering. Berfungsi sebagai tempat kegiatan memajang dan menggelar barang dagangan bagi para pedagang dan sebagai tempat terjadinya transaksi antara pedagang dan pengunjung atau pembeli.

Kantor Pasar atau Ruang Pengelola : Untuk melakukan kegiatan pengelolaan pasar, memerlukan ruangan untuk para pegawai pengelola pasar. Berfungsi sebagai ruang atau wadah bagi pengelola pasar untuk menampung atau mendukung kinerja pengelola pasar.

Fasilitas Umum : Untuk mendukung kegiatan pasar, penyediaan fasilitas pendukung antara lain disediakan, area parkir, pos satpam, klinik, toilet, bongkar muat, gudang, depot es, terminal angkutan kota. Berfungsi untuk mendukung atau membantu pengelola, pedagang dan pembeli dalam melakukan kegiatan didalam pasar.

i. Peraturan Pemerintah tentang pasar tradisional

• Keamanan

Bangunan adalah wadah tempat penggunaannya melakukan aktivitas. Desain bangunan dikatakan berhasil apabila bangunan tersebut benar-benar dapat mewadahi aktivitas dari fungsi-fungsi yang sesuai dengan yang direncanakan.

• Kesehatan

1. Kamar mandi dan WC beserta saluran pembuangan dan pengelolaannya sebagai sarana melakukan aktivitas buang air kecil, mandi, buang air besar.

2. Saluran pembuangan air hujan sebagai sarana penyaluran pembuangan air hujan. Dapat menghindari terjadinya genangan air hujan disekitar bangunan yang memancing pengembang biakan nyamuk.

3. Tempat penimbunan atau penampungan sampah sementara.

- Kenyamanan

Kenyamanan thermal adalah kenyamanan yang terkait dengan suhu udara. Setiap daerah mempunyai iklim dan suhu udara yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kemampuan adaptasi dari masyarakatnya.

- Keindahan

Aspek ini terkait dengan perwujudan Pasar Tradisional Pancur Batu untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan, pengakuan akan eksistensi diri, serta kebutuhan untuk dapat menikmati keindahan.

Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan dalam jumlah yang cukup. Apabila hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung dengan pencahayaan alami tidak dapat dipenuhi maka harus diusahakan adanya pertukaran udara dan cahaya buatan yang dapat bekerja terus menerus selama ruangan tersebut digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data diatas dapat disimpulkan bahwa pelimpahan sebagai wewenang bupati kepada Camat Benai dibidang kebersihan belum sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Faktor-faktor penghambat dapat disebabkan oleh beberapa hal baik secara intern maupun ekstern. Secara intern disebabkan oleh instansi kecamatan itu sendiri berupa kurangnya kinerja dalam melakukan pelimpahan wewenang bupati dalam bidang kebersihan. Secara ekstren dapat disebabkan oleh lingkungan luar instansi seperti masyarakat yang belum sadar benar akan kebersihan sehingga menghambat pelimpahan itu sendiri.

SARAN

1. Bagi aparat kecamatan Benai diharapkan lebih memperhatikan wewenang yang diberikan dan memahami betapa pentingnya wewenang tersebut untuk masyarakat itu sendiri.
2. Untuk dapat meningkatkan peranan camat Benai dalam bidang kebersihan dan melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait lainnya.
3. Kepada masyarakat kecamatan Benai diharapkan dapat menyadari bahwa kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Rosali, 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternative.

PT. Raja Grafinda persada, Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

Balai Pustaka, 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Curtis, dan B; Floyd, James. 1996. Komunikasi Bisnis dan Profesional. Remaja Rosdakarya, Bandung

Duncan, Tom. 2005. Principles of Adventing & IMC. Second Edition. Mc. Graw Hill. Bab 22

- Dimiyati dan mujiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta
- Kartono Kartini. 1986. Pemimpin dan Kepemimpinan. CV. Rajawali Press. Jakarta
- Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan kedua, Malang : Bayumedia
- Nurgiyanto, Burhan. 1988. Penilaian dalam Pengajaran bahasa dan sastra. BPFE : Yogyakarta
- Pamudji, S. 1998. Ekonomi Administrasi Negara, Bumi Kasara, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No 72 dan 73 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan
- Philipus M. Hadjon, 2001. Pengantar Hukum Administarsi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Madsa University Press
- Syaukani, HR. Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi daerah dalam Negara kesatuan. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Siagian, S.P, 1988, proses pengolahan pembangunan nasional, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Sotopo, Hendiyati Sumantri, 1984. Kepemimpinan dan Supervisi pendidikan, Bina Aksara, Jakarta
- Tjokroamidjojo Bintoro, Sofyan Arief Miman, Machmud Muctar. 1994. Administrasi pembangunan, Depdikbud. Jakarta
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1981, Perencanaan pembangunan, PT. Gunungh Agung, Jakarta